

PERAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM MENANGGULANGI TURBULENSI EKONOMI MASYARAKAT DALAM SITUASI PANDEMI COVID 19

Nur Iman Hakim Al Faqih, S.E.I., M.E.K.

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

hakimalfaqih02@gmail.com

Abstrak

Virus Corona (Virus Covid 19) merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan (China) pada bulan Desember 2019 dan masih berlangsung sampai sekarang. Peningkatan kasus covid-19 terjadi begitu cepat dan sangat signifikan. (WHO) sejak tanggal 30 januari 2020 menetapkan status Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Wabah ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berimbas pada sector lain seperti ekonomi. Adanya kebijakan physical distancing dalam rangka mencegah penularan virus, membuat pasar semakin lesu dan terjadi PHK secara masal. sehingga kemiskinan kian meningkat di tengah pandemi. Filantropi menjadi salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam beberapa model seperti, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari ZISWAF baik yang didapat dari lembaga unit-unit pengumpul zakat (BASNAS dan LAZIS) maupun langsung didapat dari masyarakat. perlu adanya sosialisasi yang massif terkait gerakan filantropi sehingga kesadaran masyarakat bias timbul untuk membantu sesama baik secara materi maupun moral.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Kemiskinan, Pandemi Covid-19

A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, seluruh masyarakat dunia digemparkan dengan merebaknya pandemi virus corona (Covid 19) yang membuat kekacauan di hampir setiap bidang. Virus Corona (Virus Covid 19) merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan (China) pada bulan Desember 2019 dan masih berlangsung sampai sekarang. Peningkatan kasus covid-19 terjadi begitu cepat dan sangat signifikan. Oleh karenanya badan kesehatan dunia (WHO) sejak

tanggal 30 Januari 2020 menetapkan status Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Hal tersebut didasarkan pada Penilaian WHO terhadap risiko terjadinya penularan Covid-19 secara global tergolong dalam kategori tinggi sehingga memerlukan respons internasional yang terkoordinasi dan upaya antisipasi dari seluruh negara.¹

Seperti halnya negara lain, Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak virus corona (Covid-19). Tercatat per tanggal 8 April 2020 jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 3.292 kasus, dengan tingkat kematian sebesar 280 dan pasien sembuh berjumlah 252.² Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan menyebabkan banyak negara yang mengambil keputusan ekstrem untuk melakukan “lockdown” dan beberapa kebijakan masif untuk mencegah penyebaran virus ini. Akan tetapi Indonesia hingga saat ini memilih untuk tidak melakukan *lockdown* dengan pertimbangan dampak terhadap stabilitas ekonomi. Namun dengan pemilihan opsi tanpa *lockdown* masih tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.³

Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi ini. Menurut Asian Development Bank (ADB) Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5% pada 2020 di tengah Pandemi Virus Corona. Menurut Asian Development Outlook (ADO) 2020, pandemi COVID-19 bersamaan dengan penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan, akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia tahun ini, terlebih dengan memburuknya perekonomian sejumlah mitra dagang utama Indonesia. Permintaan dalam negeri diperkirakan akan melemah seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan

¹ Nur Sholikhah Putri Suni, Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease, Info Singkat Vol.XII,No.3/I/Puslit/Februari/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

² www.covid-19.go.id, diakses tanggal 9 April 2020

³ Erika Takidah, <https://republika.co.id/berita/q7xqm5282/keuangan-sosial-islam-melawan-dampak-covid19>, diakses tanggal 9 April 2019

konsumen. Sementara itu, pendapatan ekspor dari pariwisata dan komoditas diperkirakan akan menurun, sehingga menyebabkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9% dari produk domestik bruto pada tahun 2020.⁴

Berbagai kebijakan penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan menambahkan anggaran belanja APBN sebesar Rp. 405,1 Triliun untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona di Indonesia. Penambahan belanja APBN tersebut akan menyebabkan defisit anggaran menjadi 5,07% dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini tentunya melampau batas ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa maksimal defisit anggaran adalah 3% dari PDB. Untuk itu, pemerintah melalui Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 atau Perppu untuk menambah alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.⁵

Selain kebijakan di atas, pemerintah juga menarapkan kebijakan *physical distancing*. Melalui kebijakan ini masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak atau menghindari kontak fisik dengan masyarakat lainnya untuk menghindari penularan virus. Dengan kebijakan ini pula masyarakat dibatasi mobilitasnya, guna memutus rantai penularan virus corona. Selain itu himbauan lainnya adalah dengan menghindari keramaian atau kerumunan masa, sehingga kegiatan yang bersifat pengumpulan masa dibatasi. Pemerintah lebih memilih kebijakan ini dibandingkan dengan kebijakan *lockdown* dengan pertimbangan menjaga kestabilan perekonomian Indonesia meskipun kebijakan ini tetap menggoncang

⁴ <https://economy.okezone.com/read/2020/04/05/20/2194365/prediksi-ADB-soal-ekonomi-indonesia-di-tengah-dampak-covid-19>, Diakses Tanggal 9 April 2020

⁵Sorta Tobing, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/dampak-dan-risiko-defisit-anggaran-hingga-507-untuk-atasi-corona>, diakses tanggal 9 April 2020

perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi karena kebijakan ini mengakibatkan beberapa roda perekonomian terganggu.

Salah satu dampaknya adalah menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Apalagi banyak dari perusahaan yang melakukan efisiensi perusahaan dikarenakan kapasitas produksinya menurun yang mengakibatkan banyak perusahaan melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki penghasilan dan menurunkan daya beli dari sisi pengeluaran rumah tangga. Padahal pada tahun 2019 konsumsi rumah tangga menopang sebesar 56,82% Produk domestik bruto (PDB). Sehingga ketika sektor ini terganggu maka kesetabilan ekonomi terancam.

Musibah ini bisa menjadikan titik balik bahwa negara tidak selamanya mampu mengatasi semua masalah sosial dan ekonomi sendirian. Populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak didominasi kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah, bekerja di sektor informal dan usaha mikro. perlu adanya sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah untuk mencari peluang-peluang yang bisa menciptakan alternatif solusi untuk musibah ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan pemberdayaan dana filantropi khususnya filantropi islam seperti dana Zakat, Infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) untuk menanggulangi bencana ini.

Potensi dana zakat di Indonesia tergolong besar mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menuturkan, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Lembaga ini mencatat bahwa angkanya mencapai Rp233,8 triliun, termasuk potensi zakat berupa zakat profesi.⁶Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia diharapkan dapat memaksimalkan dana filantropi tersebut yang dikelola

⁶<https://www.wartaekonomi.co.id/read255527/sayang-seribu-sayang-potensi-zakat-rp2338-triliun-belum-dioptimalkan>, diakses tanggal 9 April 2020

secara kelembagaan melalui lembaga filantropi atau lembaga keuangan sosial Islam.

Lembaga filantropi Islam memiliki posisi penting dalam mengatasi problematika sosio ekonomi masyarakat dan membantu pemerintah mengatasi permasalahan ini. Lembaga filantropi ini diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan harapan edukasi tentang pencegahan, penularan dan penanggulangan Covid-19. Salah satunya adalah dengan program pentasarufan dana ZIS kepada mereka yang terdampak khususnya bagi masyarakat pra sejahtera. Bantuan yang disalurkan Ziswaf dapat meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, sekaligus menjadi jaring pengaman sosial akibat dampak wabah Covid-19.

Kajian tentang bagaimana peran lembaga keuangan sosial islam atau filantropi islam dalam penanggulangan dampak covid 19 menarik untuk dilakukan, mengingat salah satu tujuan dari lembaga ini adalah menjadi jaring pengaman bagi masyarakat pra sejahtera. Apalagi jika kajian ini dilakukan di kota yang memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak seperti di kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten termiskin di jawa tengah tahun 2019 dengan catatan ada sekitar 201.000 rumah tangga atau sekitar 700.000 jiwa masuk dalam kategori warga miskin dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp 363.000.⁷ DI Kabupaten Kebumen sendiri dalm kondisi penyebaran virus covid 19 termasuk dalam zona merah dengan total kasus positif 3, 2 di antaranya meninggal dunia.

Di kabupaten kebumen telah eksis beberapa lembaga keuangan sosial islam. Salah satu lembaga filantropi yang berperan aktif dalam menanggulangi covid 19 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen. Baznas Kabupaten Kebumen telah bekerja sama dengan pemerintah dalam hal

⁷<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4833357/kebumen-termiskin-di-jateng-tahun-2019-ini-yang-akan-dilakukan-pemkab>, diakses tanggal 9 april 2020

penanggulangan covid 19. Selain BAZNAS, ada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang juga berperan aktif dalam penanggulangan musibah ini. LAZISNU menjadi objek menarik untuk dikaji mengingat mayoritas dari warga kebumen adalah nahdliyyin.

B. Kajian Pustaka

1. Turbulensi Ekonomi

Turbulensi ekonomi merupakan fenomena dimana dalam suatu lokasi atau negara mengalami ketidakstabilan ekonomi. Stabilitas ekonomi suatu negara berkaitan dengan bagaimana suatu negara mengendalikan perekonomian dalam jangka pendek agar terhindar dari penyakit makro utama yaitu inflasi, pengangguran dan ketimpangan dalam neraca pembayaran.⁸ Ketiga permasalahan tersebut bisa saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga tugas negara untuk menjaga stabilitas ekonomi merupakan tugas yang tidak mudah mengingat kompleksnya hubungan tiga faktor tersebut yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan.

⁸ Boediono, (2015), Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro Edisi Keempat, BPFE: yogyakarta, hal. 5

Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan perbedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Akibatnya terjadi alokasi inefisiensi sumber daya. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa mengelak dari ketidakstabilan ekonomi. Apalagi Indonesia masih sangat bergantung pada negara mitra terkait kebijakan perdagangan luar negeri, membuat Indonesia rentan akan gejolak perekonomian global. Indonesia pernah menghadapi krisis yang mematahkan sendi perekonomian nasional, yaitu krisis tahun 1998 dan tahun 2008.

Krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar, terutama USD yang terjadi sejak pertengahan 1997, mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat

terhadap Rupiah, kemudian terhadap perbankan, dan berlanjut terhadap pemerintah. Untuk mengurangi tekanan depresiasi rupiah, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta asing oleh perbankan, perubahan sistem nilai tukar dan pengetatan likuiditas perbankan (Sejarah Moneter Periode 1997-1999). Adanya pembatasan transaksi dengan non-residen tersebut dengan mengacu kepada pengalaman di masa krisis yaitu rupiah digunakan untuk spekulasi di pasar negeri (Sejarah Moneter Periode 1999-2005).

Pengalaman dari krisis ekonomi periode sebelumnya, maka arah kebijakan umum pemerintah dan kebijakan moneter bank Indonesia tertuju pada penguatan kondisi fundamental ekonomi secara makro, antara lain dalam bentuk stabilisasi moneter dan keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable*). Tingkat harga yang rendah dan stabil menjadi target utama dalam pengendalian moneter pada periode ini. Memperbaiki kinerja transaksi berjalan, neraca pembayaran dan keuangan negara, serta bagaimana menekan *Debt Service Ratio* (DSR) agar berada pada tingkat yang dianggap aman oleh bank dunia (Sejarah Moneter Periode 1999-2005).

Berbeda halnya dengan krisis tahun 2008 yang disebabkan imbas dari *subprime mortgage* di Amerika. Diawali dari penurunan suku bunga, harga rumah yang terus meningkat dengan cepat, melonggarnya standar perbankan dalam pemberian kredit, serta dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah pribadi pada akhirnya merupakan faktor-faktor yang memicu peningkatan kredit untuk kredit perumahan yang berisiko tinggi (*subprime loans*), (Outlook Ekonomi Indonesia 2009 -2014, 2009). Kredit perumahan yang telah diambil tidak dapat dibayar, mengakibatkan perusahaan

tidak dapat membayar pinjamannya ke lembaga keuangan yang memberi investasi.

Kepanikan membuat Indeks saham di Jakarta jatuh dratis ke level sekitar 1.600-an. Rupiah menurun hingga Rp 9.700/dollar AS. Akibatnya, Bank Indonesia terpaksa menaikkan BI Rate menjadi 9,50 persen. Kebijakan ini memang berbeda arah dibandingkan negara-negara maju. Kawasan Euro, Inggris, dan Australia, misalnya, cenderung menurunkan suku bunga, sebagai benteng pertahanan menghadapi imbas krisis finansial AS, berbeda dengan Indonesia yang menaikkan tingkat suku bunga.⁹

2. Pengertian Filantropi dalam Islam

Istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Abu Zahrah, 2005). Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional.

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, alQur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan

⁹Putri keumalasari dan Fakhrudin, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.1 No.2 November 2016*, hlm. 385

hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya. Al-Qur'an tidak mengintrodusir istilah zakat, tetapi sedekah. Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (QS. at-Taubah: 60).

Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu. Infak sering merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren. Sedekah biasanya mengacu pada derma yang kecil-kecil jumlahnya yang diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sedangkan wakaf hampir sama dengan infak, tetapi mempunyai unsur kekekalan manfaatnya; tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan.¹⁰

Urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara alQur'an menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, al-Qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (ita' az-zakat) dan menggandengkannya dengan perintah shalat (iqam ash-shalat). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat (QS. al-Baqarah: 177).

3. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan. Nilai

¹⁰ Al-Makassari, Ridwan. (2006). Pengarusutamaan Filantropi *Islam* untuk Keadilan Sosial di Indonesia; Proyek yang Belum Selesai: Jurnal Galang, 1(3), April.

garis kemiskinan tersebut mengacu pada kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari, ditambah dengan kebutuhan minimum non-makan yang meliputi: perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.¹¹

Menurut BPS, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan, yaitu masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per hari. Sedangkan Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari USD 2 per hari. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan karena pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti: sandang, pangan, papan. Secara umum Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah problem yang perlu diselesaikan, bahkan merupakan suatu krisis yang berbahaya sehingga harus segera ditanggulangi dan diobati. Islam menegaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang patut dilakukan dan tidak bertentangan dengan takdir Ilahi.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Adapun ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemiskinan secara adalah dengan mengetahui tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif.

Dalam konsep fiqih, untuk merumuskan kemiskinan harus mengetahui konsep kebutuhan minimum, kecukupan minimum dan kesenangan minimum.

¹¹ Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan dan *Ketimpangan*," www.bps.go.id, n.d.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: melindungi agama, hidup atau jiwa, intelektual atau akal, keluarga atau keturunan dan harta atau kekayaan.¹² Maka ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut berarti mereka telah mencapai kesejahteraan dan bebas dari kemiskinan. Berikut ini beberapa ciri yang melekat padapenduduk miskin antara lain; (1) Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan, (2) Tidak memiliki pekerjaan tetap, (3) Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan, (4) Tidak memiliki tempat tinggal, (5) Tidak terpenuhinya standar gizi minimal.¹³

C. Pembahasan

1. Peran Filantropi di masa Pandemi Covid 19

Dalam upaya pengetasan kemiskinan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan langsung adalah kebijakan dalam beberapa program yang khusus dibuat untuk mengurangi kemiskinan, jadi sasarannya adalah penduduk miskin. Sedangkan kebijakan tidak langsung adalah kebijakan ekonomi yang sasarannya bukan penduduk miskin, tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan, seperti kebijakan membatasi impor suatu produk dengan tujuan industri dalam negeri dapat tumbuh pesat, dan kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga dengan tujuan investasi dalam negeri akan meningkat, selanjutnya akan menambah kesempatan kerja dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin.¹⁴

Islam sangat menentang kemiskinan dan berusaha keras untuk membendungnya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya,

¹² Ririn Tri Puspita Ningrum, *Kemiskinan dalam Bingkai Islam KeIndonesiaan* (Yogyakarta: Interpena, 2013).

¹³ Tri Wahyu Rejekiningsih, "Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi *Kultural*," *Jurnal Ekonomi Pembanguna* 12, no. 1 (2011): 34

¹⁴ Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Praktis*, 215.

untuk menyelamatkan akidah, akhlak, memelihara kehidupan rumah tangga, menjaga kestabilan dan ketentraman masyarakat dan untuk mewujudkan rasa persaudaraan dalam masyarakat. Berikut ini beberapa upaya yang ditawarkan Islam untuk mengentaskan kemiskinan;¹⁵ (1) Bekerja. Setiap orang dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja. Karena bekerja merupakan senjata utama untuk memerangi kemiskinan, mencapai kekayaan dan kesejahteraan serta faktor utama dalam mencapai kemakmuran. (2) Mencukupi keluarga yang lemah. Sudah menjadi dasar pokok dalam Islam, bahwa setiap individu harus memerangi kemiskinan dengan bekerja dan berusaha. Dalam hal ini Islam berusaha mengentaskan kemiskinan dan berusaha menghindarkan mereka dari perbuaran yang hina, seperti mengemis dan meminta-minta. Maka dari itu Islam memiliki konsep saling menjamin antar anggota keluarga dan masyarakat untuk meringankan penderitaan dan mengentaskan kemiskinan, seperti yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.

Filantropi Islam (ZISWAF) merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan maka pembangunan masyarakat akan terwujud. Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang terkandung yaitu; (1) Dimensi spiritual, bertabahnya keimanan kepada Allah Swt. (2) Dimensi sosial, terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. (3) Dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Pada hakikatnya dengan terlaksananya

¹⁵ Al-Qordowi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Ter. Umar Fanany, 52.

filantropi Islam tersebut maka akan tercipta suatu masyarakat yang makmur, tenteram adil dan sejahtera.

Filantropi Islam adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan). Filantropi Islam ada yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek misalnya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif sekali pakai habis. Adapun yang bersifat jangka panjang dengan memberikan bantuan yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama untuk meningkatkan pendapatan. Konsepnya tidak memberikan ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk memperoleh ekonomi. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga sangat dirasakan di seluruh negara-negara terutama dalam kasus ini yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Kehidupan masyarakat semakin sulit karena wabah yang berkepanjangan. Filantropi Islam (ZISWAF) dapat mengatasi masalah umat dan kemanusiaan terutama menjadi solusi atas masalah kemiskinan. Jadi, upaya pengentasan kemiskinan tersebut adalah dengan melalui pengembangan dan pengelolaan dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan menitik beratkan pada pengelolaan dana secara produktif. Walaupun demikian ada sebagian dana yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat konsumtif.

Solusi yang dapat ditawarkan dalam beberapa model seperti, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari ZISWAF baik yang didapat dari lembaga unit-unit pengumpul zakat (BASNAS dan LAZIS) maupun langsung didapat dari masyarakat. Khusus untuk zakat, penyalurannya difokuskan terhadap mereka yang ekonominya melemah (masyarakat miskin) akibat terdampak Covid-19. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya ZISWAF dalam menghadapi permasalahan kemiskinan terutama yang disebabkan akibat adanya Covid-19. Kampanye dan sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui

media sosial (*online*) maupun media cetak (*offline*). Dengan demikian, diharapkan timbul kepekaan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ZISWAF dalam menghadapi permasalahan ekonomi selama masa pandemi ini. Dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencegahan Covid-19 seperti pembangunan dan pengadaan fasilitas penunjang pencegahan Covid-19 seperti APD (alat pelindung diri), rumah isolasi, rumah sakit darurat, alat medis, dan segala keperluan lainnya yang bersangkutan dengan pencegahan Covid-19.

Oleh karena itu diperlukannya sosialisai skema pengelolaan filantropi Islam kepada masyarakat bahwa pengelolaan ZISWAF tidak hanya berkuat pada ibadah yang bersifat formal, namun juga bisa dimanfaatkan untuk segala aktifitas yang bersifat kebaikan bersama (ibadah yang bersifat sosial), salah satunya adalah pengentasan kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Dana ZISWAF jika dikelola dengan manajemen yang baik dan bersifat produktif (investasi) maka dapat diputar untuk kegiatan yang bersifat jangka panjang, sehingga dana tersebut tidak akan habis sampai kapanpun bahkan mampu berkembang sehingga pemanfaatannya akan semakin besar dan luas. Dana ZISWAF yang bersifat konsumtif akan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat, sedangkan dana yang bersifat produktif akan mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktifitas perusahaan (kegiatan bisnis) sehingga hal tersebut mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja (mengurangi pengangguran) dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan semakin berkurang. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali aggregate demand dan aggregate supply ke kanan (dalam kurva demand and supply) diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada sektor ekonomi riil yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi. Penjelasan

tersebut membuktikan bahwa filantropi Islam mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil analisa dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan tokoh terdahulu.¹⁶

D. Kesimpulan

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Solusi yang dapat ditawarkan dalam beberapa model seperti, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari ZISWAF baik yang didapat dari lembaga unit-unit pengumpul zakat (BASNAS dan LAZIS) maupun langsung didapat dari masyarakat. Khusus untuk zakat, penyalurannya difokuskan terhadap mereka yang ekonominya melemah (masyarakat miskin) akibat terdampak Covid-19. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya ZISWAF dalam menghadapi permasalahan kemiskinan terutama yang disebabkan akibat adanya Covid-19. Kampanye dan sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui media sosial (*online*) maupun media cetak (*offline*). Dengan demikian, diharapkan timbul kepekaan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ZISWAF dalam menghadapi permasalahan ekonomi selama masa pandemi ini.

Daftar Pustaka

Al-Makassari, Ridwan. (2006). Pengarusutamaan Filantropi *Islam* untuk Keadilan Sosial di Indonesia; Proyek yang Belum Selesai: Jurnal Galang, 1(3), April.

¹⁶ Azwar, "Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19.

Al-Qordowi, Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, Ter. Umar Fanany, 52.

Boediono, (2015), Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro Edisi Keempat, BPFE: Yogyakarta

Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan dan *Ketimpangan*,” www.bps.go.id, n.d.

Erika Takidah, <https://republika.co.id/berita/q7xqm5282/keuangan-sosial-islam-melawan-dampak-covid19>, diakses tanggal 9 April 2019

Keumalasari, Putri dan Fakhruddin, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.1 No.2 November 2016, hlm. 385*

Nur Sholikhah Putri Suni, Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease, Info Singkat Vol.XII,No.3/I/Puslit/Februari/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Ningrum, Ririn Tri Puspita, *Kemiskinan dalam Bingkai Islam KeIndonesiaan*.Yogyakarta: Interpena, 2013.

Sorta Tobing, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/dampak-dan-risiko-defisit-anggaran-hingga-507-untuk-atasi-corona>, diakses tanggal 9 April 2020

Tri Wahyu Rejekiningsih, “Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi *Kultural*,” *Jurnal Ekonomi Pembanguna* 12, no. 1 (2011): 34

www.covid-19.go.id, diakses tanggal 9 April 2020

<https://economy.okezone.com/read/2020/04/05/20/2194365/prediksi-adb-soal-ekonomi-indonesia-di-tengah-dampak-covid-19>, Diakses Tanggal 9 April 2020

<https://www.wartaekonomi.co.id/read255527/sayang-seribu-sayang-potensi-zakat-rp2338-triliun-belum-dioptimalkan>, diakses tanggal 9 April 2020

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4833357/kebumen-termiskin-di-jateng-tahun-2019-ini-yang-akan-dilakukan-pemkab>, diakses tanggal 9 april 2020